



Article Informations
Corresponding Email:
gulograccella@gmail.com

Received: 28/05/2026; Accepted:
05/06/2026; Published: 30/06/2026

KERJA SAMA INDONESIA-SINGAPURA MELALUI *DEFENSE* COOPERATION AGREEMENT (DCA) TAHUN 2022-2025

Gracella Desnita Gulo

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura melalui *Defense Cooperation Agreement* (DCA) 2022–2025 merupakan strategi bilateral yang dibangun atas dasar kalkulasi rasional untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi DCA sebagai instrumen kerja sama pertahanan sekaligus strategi keamanan dengan menggunakan perspektif kerja sama internasional K.J. Holsti dan teori Neorealisme Kenneth Waltz. Dalam kerangka kerja sama internasional, negara dipahami sebagai aktor rasional yang membangun aliansi untuk mempertahankan kepentingan nasional. Sementara dari perspektif neorealisme, DCA dipandang sebagai strategi kalkulatif dalam sistem internasional yang anarkis, di mana negara bertindak berdasarkan logika *self-help* dan *balance of power* untuk mempertahankan survival. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji pelaksanaan DCA melalui latihan militer bersama, transfer teknologi pertahanan, pengelolaan *Flight Information Region* (FIR), dan pertukaran personel militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DCA tidak hanya berkontribusi terhadap penguatan kedaulatan, modernisasi alutsista, dan efisiensi operasional militer Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi strategis Indonesia dan Singapura dalam menghadapi dinamika keamanan kawasan serta rivalitas kekuatan besar. Dengan demikian, bilateral sekaligus meningkatkan daya tawar Indonesia dalam arsitektur keamanan regional.

Kata Kunci: *Defense Cooperation Agreement* (DCA) Indonesia–Singapura, kepentingan nasional, kerja sama pertahanan, kedaulatan wilayah, modernisasi militer, *Flight Information Region* (FIR), neorealisme

Abstract

Defense cooperation between Indonesia and Singapore through the 2022–2025 Defense Cooperation Agreement (DCA) represents a bilateral strategy based on rational calculations to safeguard the national interests of both countries. This study aims to analyze the implementation of the DCA as a defense cooperation instrument and security strategy by employing K.J. Holsti's concept of international cooperation and Kenneth Waltz's Neorealism. From the perspective of international cooperation, states are understood as rational actors forming alliances to preserve their national interests. Meanwhile, Neorealism emphasizes that within an anarchic international system, states operate under the logic of self-help and balance of power to ensure survival. Using a descriptive qualitative method, this research examines the implementation of the DCA through joint military exercises, defense technology transfers, Flight Information Region (FIR) management, and military personnel exchanges. The findings indicate that the DCA not only contributes to strengthening Indonesia's territorial sovereignty, military modernization, and operational efficiency but also enhances the strategic positions of both Indonesia and Singapore in addressing regional security dynamics and major power rivalries. Thus, the DCA serves as a dual-function strategic instrument: reinforcing bilateral relations while simultaneously increasing Indonesia's bargaining power within the regional security architecture.

Keywords: *Indonesia–Singapore Defense Cooperation Agreement (DCA), national interest, defense cooperation, territorial sovereignty, military modernization, Flight Information Region (FIR), Neorealism*

1. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, lanskap keamanan internasional mengalami transformasi signifikan akibat meningkatnya ancaman non-tradisional, rivalitas kekuatan besar, dan ketidakpastian geopolitik. Negara-negara di berbagai kawasan merespons dinamika ini dengan memperkuat kerja sama pertahanan sebagai strategi adaptif untuk menjaga stabilitas dan kepentingan nasional. (Kawab, 2023) Di tengah sistem internasional yang anarkis, kerja sama bilateral menjadi instrumen rasional bagi negara untuk mempertahankan eksistensi dan memperkuat posisi strategisnya. (Pierre, 2024)

Asia Tenggara sebagai kawasan yang strategis dan rentan terhadap pergeseran geopolitik global, turut mengalami tekanan keamanan yang kompleks. Ancaman lintas batas seperti terorisme, konflik maritim, dan ketegangan di Laut Cina Selatan mendorong negara-negara ASEAN untuk membangun mekanisme pertahanan yang lebih terintegrasi. (Arianto, 2020) Dalam konteks ini, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Singapura

menjadi salah satu bentuk respons terhadap kebutuhan regional akan stabilitas dan interoperabilitas militer.

Indonesia, sebagai negara dengan wilayah geografis luas dan posisi sentral di ASEAN, memiliki kepentingan strategis untuk memperkuat kedaulatan wilayah dan efisiensi operasional militernya. (Milia et al., 2018) Sementara Singapura, dengan kapabilitas teknologi tinggi dan keterbatasan geografis, membutuhkan mitra regional yang dapat mendukung latihan militer dan pengembangan kapabilitas. (Febriansyah, 2024) *Defense Cooperation Agreement* (DCA) tahun 2022–2025 hadir sebagai bentuk kalkulasi rasional kedua negara dalam menghadapi tantangan tersebut.

DCA tidak hanya mencerminkan intensifikasi hubungan bilateral, tetapi juga menunjukkan pergeseran paradigma kerja sama pertahanan dari sekadar teknis menjadi strategis. Perjanjian ini mencakup latihan militer bersama, pertukaran personel, pengelolaan *Flight Information Region* (FIR), dan transfer teknologi pertahanan. (Sabilla, 2023) Dengan demikian, DCA menjadi instrumen penting dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia, khususnya dalam penguatan kedaulatan wilayah, peningkatan strategi pertahanan, dan efisiensi operasional militer. (Anugerah & Endiartia, 2017)

Dengan meningkatnya kebutuhan negara untuk memperkuat kapabilitas pertahanan secara rasional, Indonesia dan Singapura memilih jalur kerja sama strategis melalui *Defense Cooperation Agreement* (DCA) tahun 2022-2025. (Kominfo, 2023) Perjanjian ini tidak hanya mencerminkan intensifikasi hubungan bilateral, tetapi juga menjadi respons terhadap dinamika sistem internasional yang menuntut efisiensi, interoperabilitas, dan adaptasi teknologi militer. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana kerja sama Indonesia-Singapura dalam bidang pertahanan melalui DCA selama 2022-2025?

Dalam studi hubungan internasional, kerja sama antarnegara dipandang sebagai respons rasional terhadap tekanan sistemik dan kebutuhan strategis masing-masing aktor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kerja sama internasional menurut K.J. Holsti, yang

menempatkan negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Dalam kondisi tersebut, negara tidak memiliki otoritas supranasional yang menjamin keamanan, sehingga mereka cenderung membangun aliansi dan kerja sama untuk mempertahankan eksistensi dan mencapai kepentingan nasionalnya.(Holsti, 1983).

Kerja sama internasional, termasuk dalam bidang pertahanan, bukan sekadar bentuk solidaritas atau diplomasi simbolik, melainkan strategi kalkulatif yang dirancang untuk memperkuat posisi negara dalam menghadapi dinamika global. Holsti menekankan bahwa kerja sama yang dibangun oleh negara bersifat instrumental—negara akan memilih mitra dan bentuk kerja sama yang paling menguntungkan secara politik, ekonomi, dan keamanan.(Pierre, 2024) Dalam konteks *Defense Cooperation Agreement* (DCA) antara Indonesia dan Singapura, kerja sama ini dapat dipahami sebagai upaya rasional Indonesia untuk memperkuat kedaulatan wilayah, meningkatkan efisiensi operasional militer, dan memperluas kapabilitas pertahanan melalui transfer teknologi dan pertukaran personel. (Hamdan, 2008).

Selain menggunakan teori kerja sama internasional K.J. Holsti, penelitian ini juga dianalisis dengan teori Neorealisme yang dipelopori oleh Kenneth Waltz. Neorealisme menekankan bahwa sistem internasional bersifat anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi yang dapat menjamin keamanan negara (Waltz, 1978). Dalam kondisi ini, negara dipandang sebagai aktor rasional yang berfokus pada upaya bertahan hidup (*survival*) melalui peningkatan kapabilitas militer dan strategi self-help. Kerja sama pertahanan, dalam perspektif neorealisme, bukanlah bentuk altruism, melainkan strategi kalkulatif untuk menyeimbangkan kekuatan (*balance of power*) di kawasan (Noer, 2022). Dengan demikian, DCA Indonesia–Singapura 2022–2025 dapat dipahami sebagai instrumen yang digunakan kedua negara untuk memperkuat posisi relatifnya dalam menghadapi dinamika keamanan Asia Tenggara dan rivalitas kekuatan besar di kawasan.

Untuk mengkaji implementasi DCA secara mendalam, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena kerja sama pertahanan secara kontekstual dan interpretatif (Creswell, 2019), sesuai dengan dinamika hubungan bilateral Indonesia–Singapura. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur, dengan sumber data meliputi: Dokumen resmi kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan MINDEF Singapura, Literatur akademik terkait kerja sama pertahanan dan teori hubungan Internasional, dan wawancara kepada pihak Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan RI

Analisis data dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.(Bakry, 2016) Validitas hasil diperkuat melalui triangulasi sumber dan konsistensi teoritis, sehingga interpretasi terhadap implementasi DCA dapat disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

2. PEMBAHASAN

Latihan Militer dan Operasi Gabungan

Di tengah dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara yang semakin kompleks, negara-negara di ASEAN dituntut untuk membangun kerja sama pertahanan yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional dan strategis. Ancaman lintas batas seperti terorisme, kejahatan siber, dan pelanggaran wilayah maritim mendorong negara-negara untuk memperkuat kapabilitas militer melalui latihan gabungan dan koordinasi lintas institusi (Prihandoko et al., 2022). Dalam konteks ini, Indonesia dan Singapura sebagai dua aktor penting di kawasan menjalin kerja sama pertahanan yang bersifat kalkulatif dan berorientasi pada peningkatan interoperabilitas serta efisiensi operasional.

Defense Cooperation Agreement (DCA) tahun 2022–2025 menjadi landasan hukum dan strategis bagi pelaksanaan latihan militer bersama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan *Singapore Armed Forces* (SAF).(Ministry of Defence Singapore, 2025) Latihan seperti Safkar Indopura untuk Angkatan Darat, Eagle

Indopura untuk Angkatan Laut, dan Elang Indopura untuk Angkatan Udara telah berlangsung secara rutin dan menjadi sarana peningkatan profesionalisme serta kesiapan tempur kedua negara (AD, n.d.). Latihan ini tidak hanya memperkuat kemampuan teknis, tetapi juga membangun komunikasi lintas budaya dan kepercayaan strategis yang penting dalam menjaga stabilitas kawasan.



Gambar 1. 1 Area Latihan Militer Singapura Berdasarkan Defense Cooperation (DCA)

Sumber: jurnalpatrolinews 2022

Implementasi DCA juga mencakup pengaturan wilayah latihan militer yang telah disepakati bersama, yaitu Area Alpha 1, Alpha 2, dan Bravo. Area Alpha 1 mencakup wilayah darat dan udara di sekitar Kepulauan Riau, yang digunakan untuk latihan manuver tempur dan simulasi penyerangan udara. Area Alpha 2 meliputi zona laut dan udara di bagian timur wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura, digunakan untuk latihan patroli maritim dan pengujian sistem radar (Febriansyah, 2024). Sementara Area Bravo merupakan zona latihan gabungan yang mencakup wilayah udara dan laut di sekitar Natuna dan Laut Cina Selatan, yang strategis untuk simulasi operasi gabungan dan penguatan pengawasan wilayah perbatasan. (Hidayat et al., 2024)

Latihan di ketiga area tersebut dilaksanakan dengan pengawasan penuh dari TNI dan berdasarkan protokol operasional yang telah disepakati dalam forum *Defense Cooperation Committee* (DCC). (Ministry of Defence Singapore, 2025) Kegiatan ini menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan tidak hanya memperkuat kapabilitas militer, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi pertahanan yang menjaga kedaulatan dan kontrol atas wilayah nasional. Dalam konteks pengelolaan Flight Information Region (FIR), latihan ini juga berfungsi sebagai simulasi teknis

untuk memperkuat kapabilitas Indonesia dalam mengelola ruang udara sendiri, khususnya di wilayah yang sebelumnya berada di bawah otoritas Singapura. (Rabbani, 2023)

Dengan pendekatan yang rasional dan berbasis kepentingan nasional, pelaksanaan latihan militer bersama dalam kerangka DCA mencerminkan strategi pertahanan Indonesia yang adaptif terhadap struktur sistem internasional yang anarkis. Negara bertindak bukan semata karena kedekatan geografis, tetapi karena kebutuhan untuk memperkuat posisi strategis dan mempertahankan eksistensi dalam lingkungan keamanan yang kompetitif (Wardoyo, 2015). Oleh karena itu, kerja sama ini tidak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga memperkuat fondasi pertahanan nasional Indonesia secara terukur dan berkelanjutan.

Transfer Teknologi dan Modernisasi Alutsista

Dalam lanskap keamanan Asia Tenggara yang terus berkembang, modernisasi alutsista menjadi kebutuhan strategis bagi negara-negara yang ingin mempertahankan relevansi dan daya tangkal militernya. Ketimpangan teknologi antar negara di kawasan mendorong pentingnya kerja sama pertahanan yang tidak hanya bersifat taktis, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kapabilitas struktural. Bagi Indonesia, sebagai negara dengan wilayah geografis yang luas dan kompleksitas ancaman yang tinggi, modernisasi alutsista bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. (Ramadhan, 2024)

Defense Cooperation Agreement (DCA) 2022–2025 antara Indonesia dan Singapura membuka jalur strategis bagi transfer teknologi militer yang bersifat praktis dan berkelanjutan. Singapura, dengan sistem persenjataan yang lebih maju dan pendekatan militer berbasis teknologi tinggi, menjadi mitra ideal dalam proses peningkatan kapabilitas teknis TNI. (Milia et al., 2018) Melalui pelatihan teknis, simulasi tempur, dan pengenalan sistem persenjataan canggih, personel TNI memperoleh akses terhadap pengetahuan operasional dan teknologis yang sebelumnya terbatas. (RI, 2023)

Pelatihan ini mencakup pengoperasian sistem radar, komunikasi taktis, dan integrasi sensor dalam platform tempur modern. Dalam beberapa

sesi, personel TNI juga diperkenalkan pada sistem *command and control* (C2) yang digunakan SAF, termasuk interoperabilitas antar unit dalam skenario tempur gabungan. Simulasi yang dilakukan di Area Alpha 1 dan Alpha 2 memungkinkan TNI untuk menguji adaptabilitas terhadap sistem navigasi dan persenjataan yang digunakan oleh SAF, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan peningkatan pada sistem domestik. (Brahmana, 2023)

Transfer teknologi ini tidak bersifat satu arah. Indonesia juga memanfaatkan kerja sama ini untuk mengevaluasi dan mengembangkan alutsista nasional melalui *reverse engineering* dan peningkatan kapasitas industri pertahanan dalam negeri. Dalam beberapa kasus, pelatihan teknis yang diberikan oleh SAF menjadi dasar bagi pengembangan prototipe lokal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan geografis dan operasional Indonesia. (Yiwen et al., 2024)

Kerja sama ini mencerminkan strategi peningkatan kapabilitas negara dalam menghadapi struktur internasional yang anarkis. Negara tidak hanya mengandalkan aliansi, tetapi juga berupaya memperkuat kapabilitas internal melalui akuisisi teknologi dan peningkatan profesionalisme militer. Dalam konteks ancaman non-tradisional seperti serangan siber dan gangguan komunikasi satelit, penguasaan teknologi menjadi elemen kunci dalam mempertahankan kedaulatan dan efektivitas pertahanan nasional.

Dengan demikian, DCA tidak hanya menjadi instrumen diplomasi pertahanan, tetapi juga katalisator bagi transformasi struktural militer Indonesia (Samy & Kusumadewi, 2021). Transfer teknologi yang terjadi melalui kerja sama ini memperkuat daya saing militer nasional dan membuka jalan bagi integrasi sistem pertahanan yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada masa depan.

Pengelolaan FIR dan Penguatan Kedaulatan

Dalam sistem internasional yang anarkis, negara-negara dituntut untuk mempertahankan kedaulatan dan kontrol atas wilayah strategisnya, termasuk ruang udara. Pengelolaan *Flight Information Region* (FIR) menjadi salah satu

indikator penting dalam kapasitas kelembagaan dan teknis suatu negara dalam menjaga keselamatan penerbangan, keamanan nasional, dan supremasi hukum. (Rabbani, 2023) Di kawasan Asia Tenggara, pengelolaan FIR tidak hanya menyangkut aspek teknis navigasi udara, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan dan posisi tawar dalam diplomasi regional (Indonesia, n.d.).

Indonesia dan Singapura telah lama terlibat dalam diskusi mengenai pengelolaan FIR, khususnya di wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna yang selama beberapa dekade berada di bawah otoritas Singapura. Ketimpangan ini berakar dari keputusan *International Civil Aviation Organization* (ICAO) pada tahun 1946, yang saat itu menilai Singapura lebih siap secara teknis untuk mengelola wilayah tersebut (Puteh et al., 2024). Namun, seiring dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan dan teknologi navigasi Indonesia, tuntutan untuk merebut kembali pengelolaan FIR menjadi bagian dari agenda strategis nasional (Puteh et al., 2024).

Defense Cooperation Agreement (DCA) 2022–2025 menjadi titik balik dalam penyelesaian isu FIR. Melalui pendekatan *package deal* yang mengintegrasikan DCA, perjanjian ekstradisi, dan pengalihan FIR, Indonesia berhasil memperoleh kembali hak pengelolaan atas wilayah udara strategis tersebut. (Sutrisno & Romdoni, 2022) Latihan dan koordinasi teknis yang dilakukan dalam kerangka DCA, termasuk simulasi pengendalian lalu lintas udara dan pelatihan personel navigasi, menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan dapat diarahkan untuk memperkuat aspek kelembagaan dan kedaulatan negara.

Pengelolaan FIR dalam konteks DCA bukan hanya soal efisiensi operasional, tetapi juga representasi dari keberhasilan diplomasi pertahanan Indonesia. Dengan menguasai kembali ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna, Indonesia memperkuat kontrol atas jalur penerbangan internasional yang vital, sekaligus menunjukkan bahwa negara mampu mengelola wilayah strategisnya secara mandiri dan profesional. Hal ini juga berdampak pada peningkatan pendapatan negara dari sektor navigasi udara, serta memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum regional seperti ASEAN dan ICAO (Febriyanti et al., 2024).

Dari perspektif teori kerja sama internasional menurut K.J. Holsti, pengelolaan FIR melalui DCA mencerminkan pertemuan kepentingan strategis antara dua negara yang saling melengkapi. Singapura memperoleh jaminan

keamanan dan kelangsungan operasional penerbangan melalui koordinasi teknis, sementara Indonesia mendapatkan pengakuan atas kedaulatan dan kapasitas kelembagaannya (Holsti, 1983). Dalam kerangka neorealisme, penguasaan FIR menjadi bagian dari strategi negara untuk memperkuat posisi dalam sistem internasional yang kompetitif dan tidak sepenuhnya kooperatif (Burchill, 2019).

Dengan demikian, pengelolaan FIR melalui DCA bukan hanya capaian teknis, tetapi juga simbol keberhasilan Indonesia dalam mengintegrasikan diplomasi, pertahanan, dan kedaulatan dalam satu kerangka kerja sama yang rasional dan berkelanjutan. Kerja sama ini memperkuat fondasi strategis Indonesia dalam menghadapi tantangan regional, sekaligus menunjukkan bahwa negara mampu bertindak sebagai aktor rasional yang mengelola kepentingan nasionalnya secara efektif dalam sistem internasional yang dinamis.

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pertukaran Personel

Dalam lingkungan keamanan regional yang semakin kompleks, penguatan sumber daya manusia (SDM) militer menjadi elemen strategis yang tak terpisahkan dari upaya mempertahankan kapabilitas nasional. Negara-negara di Asia Tenggara menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari ancaman tradisional hingga non-tradisional seperti kejahatan siber dan terorisme lintas batas. Di tengah keterbatasan anggaran dan ketimpangan teknologi, peningkatan kualitas personel menjadi strategi rasional untuk menjaga daya saing dan efektivitas pertahanan. Dalam konteks ini, kerja sama bilateral dalam bidang pendidikan dan pelatihan militer menjadi instrumen penting untuk membangun profesionalisme dan interoperabilitas lintas negara (Kemhan, 2022).

Defense Cooperation Agreement (DCA) 2022–2025 antara Indonesia dan Singapura memberikan ruang yang luas bagi pengembangan SDM militer melalui program pertukaran personel, pelatihan teknis, dan pendidikan tinggi strategis. Personel TNI secara rutin mengikuti pelatihan di fasilitas militer Singapura seperti *SAFTI Military Institute*, yang dikenal dengan pendekatan berbasis simulasi tempur dan teknologi tinggi (Yiwen et al., 2024). Sebaliknya, Singapura juga mengirimkan perwira militernya untuk mengikuti program magister di Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan RI), yang menawarkan disiplin ilmu seperti diplomasi pertahanan, manajemen konflik, dan strategi keamanan nasional. Interaksi ini tidak hanya memperluas wawasan strategis, tetapi juga memperkuat jejaring pertahanan

bilateral yang berbasis pada kesamaan pemahaman dan nilai profesionalisme (Abke, 2023).

Evaluasi kompetensi personel dilakukan secara sistematis melalui *benchmarking* dan forum teknis seperti *Joint Training Working Group* (JTWG), yang memungkinkan kedua negara untuk menyusun standar pelatihan bersama dan mengukur efektivitas program secara objektif. Dalam forum ini, indikator keberhasilan pelatihan tidak hanya mencakup aspek teknis dan taktis, tetapi juga kemampuan analitis, kepemimpinan, dan adaptasi terhadap skenario ancaman yang dinamis. Pendekatan ini mencerminkan bahwa kerja sama pertahanan tidak hanya berfokus pada alutsista dan operasi militer, tetapi juga pada pembangunan kapasitas manusia sebagai fondasi utama dari kekuatan (L. Surata, wawancara, 12 Maret 2025).

Dari perspektif teori kerja sama internasional menurut K.J. Holsti, peningkatan SDM militer melalui DCA mencerminkan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dan berakar pada kepentingan nasional masing-masing negara. Indonesia memanfaatkan kerja sama ini untuk memperkuat profesionalisme TNI dan memperluas pengaruh strategis melalui diplomasi pendidikan, sementara Singapura memperoleh mitra regional yang dapat mendukung pelatihan lintas wilayah dan memperkuat interoperabilitas. Dalam kerangka neorealisme, penguatan SDM militer menjadi bagian dari strategi negara untuk mempertahankan eksistensi dan daya tawar dalam sistem internasional yang kompetitif.

Dengan demikian, kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan militer antara Indonesia dan Singapura melalui DCA bukan hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga memperkuat fondasi pertahanan nasional secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas personel menjadi investasi jangka panjang yang memungkinkan negara untuk merespons ancaman dengan lebih adaptif, profesional, dan strategis.

Dialog Kebijakan dan Koordinasi Strategi

Dalam sistem internasional yang anarkis dan kompetitif, negara-negara tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga membangun mekanisme komunikasi strategis untuk mempertahankan stabilitas dan kepentingan nasional. Di kawasan Asia Tenggara, dinamika keamanan yang terus berubah—mulai dari ancaman non-tradisional hingga rivalitas kekuatan besar—menuntut negara-negara seperti Indonesia dan Singapura untuk membentuk struktur kerja sama yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga diplomatik dan institusional. Dalam konteks ini, dialog kebijakan pertahanan menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan kepentingan, mengelola isu sensitif, dan merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis (Suyanto, 2019).

Defense Cooperation Agreement (DCA) 2022–2025 antara Indonesia dan Singapura tidak hanya mencakup latihan militer dan transfer teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya koordinasi kebijakan melalui forum formal seperti *Defence Cooperation Committee* (DCC) dan *Combined Annual Report Meeting* (CARM-INDOSIN) (Ermawan, 2025). Kedua forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi strategis yang memungkinkan kedua negara untuk membahas arah kerja sama pertahanan secara sistematis, mengevaluasi pelaksanaan program, dan menyusun langkah-langkah lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Dalam pertemuan DCC, misalnya, dibahas isu-isu seperti pengembangan fasilitas latihan bersama, pengelolaan wilayah udara, dan penguatan interoperabilitas militer. Forum ini juga menjadi ruang negosiasi untuk menyamakan persepsi terhadap ancaman regional dan merancang respons kolektif yang tetap berakar pada kepentingan nasional (L. Surata, wawancara, 12 Maret 2025).

Bagi Indonesia, keberadaan DCC dan CARM-INDOSIN menjadi sangat strategis karena memungkinkan negara untuk mempertahankan kontrol atas wilayah latihan yang digunakan oleh Singapura, sekaligus memastikan bahwa seluruh kegiatan berada dalam koridor kedaulatan nasional (Ministry of Defence Singapore, 2025). Dialog ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan DCA, sehingga potensi ketimpangan manfaat atau pelanggaran prosedural dapat diminimalkan. Selain itu, forum-forum ini memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam menghadapi tekanan regional, karena menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan dijalankan secara transparan, terukur, dan berbasis institusi (Simbolon, 2025).

Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, dialog kebijakan bilateral antara Indonesia dan Singapura mencerminkan logika kerja sama internasional menurut K.J. Holsti, di mana negara bertindak sebagai aktor rasional yang membangun aliansi strategis untuk mempertahankan eksistensi dan mencapai kepentingan nasional (Yiwen et al., 2024). Dalam kerangka ini, DCA bukan hanya perjanjian teknis, tetapi juga platform diplomasi pertahanan yang memungkinkan kedua negara untuk mengelola ketidakpastian sistem internasional secara kolektif namun tetap berlandaskan kalkulasi masing-masing. Oleh karena itu, dialog kebijakan dan koordinasi strategis menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa kerja sama pertahanan Indonesia–Singapura berjalan efektif, berkelanjutan, dan menguntungkan kedua belah pihak secara seimbang (Kemhan, 2023).

KESIMPULAN

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura melalui Defense Cooperation Agreement (DCA) 2022–2025 merupakan strategi bilateral yang dibangun atas dasar kalkulasi rasional dalam menghadapi dinamika sistem internasional yang anarkis. DCA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis militer, tetapi juga sebagai platform diplomasi pertahanan yang mendukung penguatan kedaulatan, efisiensi operasional, dan modernisasi kapabilitas militer Indonesia. Melalui pelaksanaan latihan militer bersama di wilayah Alpha 1, Alpha 2, dan Bravo, transfer teknologi pertahanan, pengelolaan Flight Information Region (FIR), serta program pertukaran personel, kerja sama ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapabilitas militer dan kedaulatan Indonesia.

Selain itu, forum teknis seperti Defence Cooperation Committee (DCC) dan Joint Training Working Group (JTWG) memastikan bahwa pelaksanaan DCA berjalan terukur, transparan, dan sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing pihak. Dari perspektif teori kerja sama internasional menurut K.J. Holsti, DCA mencerminkan bentuk kerja sama rasional yang saling menguntungkan. Sementara dari perspektif Neorealisme Kenneth Waltz, DCA dipahami sebagai strategi kalkulatif dalam sistem internasional yang anarkis, di mana negara bertindak berdasarkan logika self-help dan balance of power untuk mempertahankan survival.

Dengan demikian, DCA tidak hanya mempererat hubungan bilateral Indonesia–Singapura, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan dan memperkuat daya tawar Indonesia dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik. Oleh karena itu, DCA dapat dipandang sebagai model diplomasi pertahanan yang adaptif, terukur, dan relevan bagi kepentingan strategis Indonesia di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abke, T. (2023). *Pendidikan dan pelatihan memegang peran utama bagi peningkatan kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura*. Indo Pacific Defense FORUM. <https://ipdefenseforum.com/id/2023/03/pendidikan-dan-pelatihan-memegang-peran-utama-bagi-peningkatan-kerja-sama-pertahanan-indonesia-singapura/>
- AD, A. T. (n.d.). *Kasad: Latma Safkar Indopura 2024, Ajang Pererat Kerja Sama dan Tingkatkan Profesionalisme Prajurit*. TNI Angkatan Darat. <https://tniad.mil.id/kasad-latma-safkar-indopura-2024-ajang-pererat-kerja-sama-dan-tingkatkan-profesionalisme-prajurit/>
- Anugerah, B., & Endiartia, J. J. (2017). Strategi Diplomasi Republik Indonesia Guna Mencapai Kepentingan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional: Pendekatan Historis dan Futuristis. *Jurnal Kajian Lemhannas* *RI*, *31*, 31–44. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11865870.v1>
- Arianto, M. F. (2020). Potensi Wilayah Pesisir di Negara Indonesia. *Jurnal Geografi*, *20*(20), 1–7.
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*.
- Brahmana, D. P. (2023). PENGARUH DEFENSE COOPERATION AGREEMENT INDONESIA DAN SINGAPURA TERHADAP LINGKUNGAN STRATEGIS DI ASIA TENGGARA DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PERTAHANAN 1. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *10*(7), 3585–3596. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Burchill, S. (2019). *TEORI-TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL* (A. Kundori

- (ed.)). Penerbit Nusa Media.
<https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=dzRgEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Waltz+menekankan+bahwa+dalam+Neo-realisme,+perhatian+tidak+hanya+pada+tindakan+individu+negara,+tetapi+pada+sistem+internasional+yang+lebih+besar.+Negara-negara,+meskipun+berbeda+>
- Creswell, J. W. (2019). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *SAGE* (Vol. 11, Issue 1).
- Ermawan, D. (2025). *THE 2ND DEFENCE COOPERATION COMMITTEE (DCC)*. *July*, 1–14.
- Febriansyah, D. R. (2024). PENGARUH MILITARY TRAINING AREA (MTA) RI-SINGAPURA TERHADAP KEAMANAN NASIONAL INDONESIA 2022-2023. *Jurnal Mahasiswa Prodi Studi Ilmu Hubungan Internasional - FISIP - UNJANI*, 1, 1–22.
<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/GIJ/article/view/2509>
- Febriyanti, Suhariyanto, D., & Ismail. (2024). *Kebijakan Tata Negara dalam Pengelolaan Flight Information Region (FIR) sebagai Upaya Penguatan Kedaulatan Udara Indonesia*. November 2024, 1–9.
- Hamdan, Y. (2008). DCA RI-Singapura: Tinjauan Negosiasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(1), 89–96. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1153>
- Hidayat, A. R., Alifah, N., Rodiansjah, A. A., & Asikin, M. Z. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, dan Implikasi Geopolitik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 579–591. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i2.1041>
- Holsti, K. J. (1983). *INTERNATIONAL POLITICS A FRAMEWORK FOR ANALYSIS* (1st ed). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
<https://archive.org/details/internationalpol0004hols/page/178/mode/2up?view=theater&q=anarchist>
- Indonesia, K. P. R. (n.d.). *FIR Jakarta untuk Ruang Udara di Atas Kepri-Natuna Resmi Diatur Indonesia*. Dep.Hub.Go.Id.
<https://dephub.go.id/post/read/fir-jakarta-untuk-ruang-udara-di->

atas-kepri-natuna-resmi-diatur-indonesia

- Kawab, L. M. (2023). Dampak Kerjasama Bilateral dan Implementasi BLM (Border Liaison Meeting) dalam Pertahanan dan Keamanan Indonesia-PNG. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2632–2639.
- Kemhan. (2022). *KATALOG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADIKLAT KEMHAN TA 2022*.
- Kemhan, B. H. (2023). *Sekjen Kemhan RI Bicarakan Implementasi DCA Dengan Sekjen Kemhan Singapura*. KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN. <https://www.kemhan.go.id/2023/02/02/sekjen-kemhan-ri-bicarakan-implementasi-dca-dengan-sekjen-kemhan-singapura.html>
- Kominfo. (2023). *Indonesia di Lingkup ASEAN: Peran, Pengaruh, Manfaat, dan Upaya Masa Depan*. ASEAN Indonesia 2023. <https://asean2023.id/id/news/indonesia-in-asean-scope-role-influence-benefits-and-future-efforts>
- Milia, J., Kurniawan, Y., & Poespithadi, W. (2018). Analysis of Defense Cooperation Agreement Between Indonesia and Singapore in 2007–2017 Through Defense Diplomacy Goal Variable. *Jurnal Pertahanan*, 4(2), 104. <https://doi.org/10.33172/jp.v4i2.283>
- Ministry of Defence Singapore. (2025). *Singapore and Indonesia Reaffirm Strong and Long-standing Bilateral Defence Relations*. MINDEF. <https://www.mindef.gov.sg/news-and-events/latest-releases/05aug25-nr2>
- Noer, H. H. (2022). Perang Dan Keamanan Dalam Tinjauan Teori Neorealisme Dan Institusionalisme. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(1), 25–36. <https://doi.org/10.24853/independen.3.1.25-36>
- Pierre, C. (2024). International Cooperation in International Relations. In *Atlantic International University* (Issue June). https://www.researchgate.net/publication/381155341_International_Cooperation_in_International_Relations
- Prihandoko, R., Dizar, S., & Patricia. (2022). *Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Singapura*.

<https://img.lab45.id/images/article/2022/03/14/170/4992diplomasi-pertahanan-indonesia-dan-singapura.pdf>

- Puteh, N. A., Prabandari, A. P., & Setyawanta, L. T. (2024). Implikasi Perjanjian Penyesuaian FIR Antara Indonesia dengan Singapura Tahun 2022 terhadap Wilayah Udara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 35–48. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.35-48>
- Rabbani, F. (2023). *Respon Singapura Terhadap Pengambilalihan Flight Information Region (Fir) Tahun 2022*.
- Ramadhan, F. (2024). *Latma Safkar Indopura: Adu Strategi dan Perkuat Kerja Sama Militer Indonesia-Singapura*. Indonesia Defense. <https://indonesiadefense.com/latma-safkar-indopura-adu-strategi-dan-perkuat-kerja-sama-militer-indonesia-singapura/>
- RI, K. K. B. K. dan I. (2023). *UU 3/2023: Pengesahan Perjanjian Kerja Sama Bidang Pertahanan antara RI-Singapura*. JDIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI. <https://jdih.maritim.go.id/uu-32023-pengesahan-perjanjian-kerja-sama-bidang-pertahanan-antara-ri-singapura>
- Sabilla, K. (2023). *Ratifikasi FIR pada Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura: Manfaat dan Implementasinya*. https://www.researchgate.net/publication/376954447_Ratifikasi_FIR_pada_Perjanjian_Bilateral_Indonesia-Singapura_Manfaat_dan_Implementasinya
- Samy, M., & Kusumadewi, J. A. (2021). Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-tradisional Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 45. <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.25547>
- Simbolon, K. (2025). *Analisis perjanjian pertahanan dan keamanan indonesia-singapura*. 19(01), 47–58.
- Sutrisno, N., & Romdoni, R. N. M. (2022). Ratifikasi Perjanjian Penyesuaian Wilayah Informasi Penerbangan antara Indonesia dan Singapura: Pilihan Rasional atau Status Quo? *Jurnal Hukum*, 5(2), 393–417.

<https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.393-417>

Suyanto, B. (2019). *Indonesia perkuat kemitraan ekonomi dengan Singapura*.

ANTARA (Kantor Berita Indonesia).

<https://www.antaranews.com/berita/1066068/indonesia-perkuat-kemitraan-ekonomi-dengan-singapura>

Waltz, K. N. (1978). *Theory of International Politics*. In *Addison-Wesley Publishing Company*. <https://doi.org/10.4324/9781912282388>

Wardoyo, B. (2015). *Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya untuk Indonesia*. Nugra Media.

<https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ltDKCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=Teori+neorealisme,+yang+dipelopori+oleh+Kenneth+Waltz,+merupakan+salah+satu+pendekatan+dominan+dalam+studi+hubungan+internasional+yang+memberikan+fokus+pada+struktur+sistem+intern>

Yiwen, T., Prima Kusuma Sumedi, A., Roy Simbolon, I. P., & Kurnia, D. (2024). Strategi Peningkatan Latihan Bersama Di Antara Tni-Ad Dan Tentara Singapura Dalam Rangka Menghadapi Operasi Multi-Domain. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 12(3), 316–316. [file:///C:/Users/GARUDA 2/Downloads/6472-File Utama Naskah-14630-2-10-20240910.pdf](file:///C:/Users/GARUDA%20Downloads/6472-File%20Utama%20Naskah-14630-2-10-20240910.pdf)